

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEROVINSI SULAWESI TENGGARA

Siska Wati^{1*}, Gunawan², Erni Qamariah³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo
e-mail: sskhwty09@gmail.com
Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang dengan sangat baik. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dan pendukung yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIRUP pada layanan arsip perpustakaan di Sulawesi Tenggara. Indikator efektivitas penerapan SIRUP yang dicapai meliputi keamanan data, kapasitas sistem dalam mencegah transaksi ilegal (akses tidak sah) dan kerusakan sistem, kecepatan serta keakuratan informasi saat menggunakan sistem, sejauh mana informasi dicatat dan dihitung, kelengkapan konten informasi yang dihasilkan oleh sistem, serta kesesuaian dan kegunaan laporan. Realisasi sistem ini sejalan dengan tujuan pembentukan Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Penerapan Informasi, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of implementing the General Procurement Plan Information System (SIRUP) in enhancing the efficiency and transparency of the procurement process for goods and services at the Library and Archives Office of Southeast Sulawesi Province. The research method applied is qualitative with a descriptive approach. Based on the conducted research, the results show that the effectiveness of SIRUP implementation at the Library and Archives Office of Southeast Sulawesi Province has developed very well. However, there are hindering and supporting factors that need to be considered in the implementation of SIRUP in library archive services in Southeast Sulawesi. The indicators of SIRUP implementation effectiveness achieved include data security, the system's capacity to prevent illegal transactions (unauthorized access) and system damage, the speed and accuracy of information when using the system, the extent to which information is recorded and calculated, the completeness of the information content generated by the system, and the relevance and usefulness of the reports. The realization of this system aligns with the objectives of the establishment of the Procurement Policy Agency (LKPP).

Keywords: Effectiveness of Services, Implementation of Information, General Procurement Plan Information System (SIRUP).

PENDAHULUAN

Perkembangan information and communication technologies (ICTSs) atau teknologi informasi dan komunikasi TIK demikian pesatnya dengan itu, memasuki era yang serba digital saat ini tidantai pula dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami perkembangan. Melihat itu, pemerintah seluruh dunia kemudian berupaya untuk mengadaptasikan pemanfaatan TIK dalam tata keola pemerintahannya. Pembicaraan mengenai penggunaan TIK, beberapa istilah kemudian sering digunakan dalam sektor publik seperti e-government.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan reformasi di semua bidang pemerintahan dan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi, yang dikenal sebagai e-Government. Perancangan e-Government di Indonesia dimulai pada tanggal 24 April 2001 dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Teknologi Informasi). Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokratisasi (Masyhur, 2017). Langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik mencakup reformasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-Government.

Pengembangan e-Government di Indonesia dimulai pada 24 April 2001 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai bidang Telematika (Komunikasi, Media, dan Informatika). Instruksi tersebut menegaskan kewajiban pejabat pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi guna menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif dan mempercepat prosesnya. Referensi literatur menyebutkan hal ini (Masyhur, 2017; Deby Ariesta, 2021).

E-Government merupakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan informasi, pelayanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional pemerintahan kepada masyarakat. E-Government ini tidak hanya dapat digunakan oleh lembaga eksekutif, namun juga dapat digunakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat untuk urusan administrasi dan urusan pemerintahan lainnya (Marthinus. M 2023).

Awalnya, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi langsung di

lokasi tertentu. Namun, saat ini, pengadaan tersebut dapat dilakukan secara tidak langsung. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara pengadaan barang dan jasa menjadi lebih fleksibel, memungkinkan kegiatan ini dilakukan dari berbagai lokasi. Transformasi ini menjadikan informasi yang relevan menjadi lebih akurat, lebih mudah dipahami, dan lebih transparan. Contoh lembaga yang memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menerapkan Sistem Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP).

SIRUP, yang merupakan Sistem Perencanaan Pengadaan Terpadu, adalah proses pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh pemerintah melalui platform elektronik menggunakan teknologi web/internet dan fasilitas komunikasi serta informasi, termasuk lelang umum secara elektronik. Pengenalan SIRUP merupakan langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Akses Informasi Publik. Sesuai rencana Peraturan Pelaksana tahun 2012, seluruh proses lelang akan dilaksanakan. Penyediaan barang dan jasa melalui instansi pemerintah harus dilakukan secara elektronik.

Penggunaan sistem ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), suatu divisi atau bagian yang dibentuk oleh otoritas yang menyelenggarakan RUP (Program Pengadaan Umum) atau Sistem Informasi Program Pengadaan Umum (SIRUP). Penerapan Sistem Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (LKPP) harus diadopsi oleh seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia, meskipun masing-masing instansi pemerintah memiliki anggaran yang berbeda. Faktor ini menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengadaan dan pelayanan Pemerintah Daerah (LKPP) ketika mengembangkan sistem RUP. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 19 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Negara. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Direktur Jenderal Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam praktiknya, sistem informasi perencanaan pengadaan yang terintegrasi juga harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan SIRUP untuk pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa adalah efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan,

transparansi, non-diskriminasi dan akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Ihardjowijono dan Muhammad pada tahun 2008 sebagaimana dikutip oleh Sarjana Putu Jati pada tahun 2016. Sistem Informasi Perencanaan Komprehensif Pengadaan (SIRUP) didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden Pasal 111 Angka 1, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelelangan Barang dan Jasa. Perintah Eksekutif tersebut telah diperbarui melalui Perintah Eksekutif Nomor 2, April 2015, yang menetapkan prosedur lelang barang dan pengadaan barang dan jasa secara online daripada manual.

Kajian pendahuluan yang dilakukan peneliti menemukan bahwa masih terdapat permasalahan pada penggunaan SIRUP pada layanan perpustakaan dan kearsipan di Sultra. Hal ini disebabkan karena staf belum memahami cara penggunaan Sistem Informasi Umum Perencanaan Pengadaan dan kualitas aplikasi SIRUP yang masih kurang memuaskan serta sangat lambat dari segi waktu kerja.

Mengingat permasalahan dan kendala pelayanan perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tenggara diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan SIRUP pada pelayanan perpustakaan dan kearsipan di Sultra. Karena sistem informasi yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan suatu organisasi dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut.

METODE

Penelitian ini berlangsung di Kantor Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di Jl. Saosao, Kel. Kecamatan Bende. Kadia, Kota Kendari. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki masalah secara menyeluruh dalam konteks waktu dan situasi tertentu, serta dilakukan secara alami dan spontan sebagai tanggapan terhadap situasi objektif di lapangan. Landasan teori digunakan sebagai pedoman untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan realitas yang ada di lapangan (Sagiyono, 2014). Sumber data penelitian ini berasal dari sejumlah besar pegawai yang mempengaruhi implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Sumber Daya Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode: observasi 4.444, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan dan validasi (Pawito, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara

Efektivitas merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal sesuai keinginan. SIRUP Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan yang efektif menjadikan informasi Perencanaan Umum Pengadaan (RUP) mudah diakses dan tersedia bagi semua orang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Risky Bahar, penanggung jawab SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di bawah ini adalah hasil wawancara penelitian kami dengannya.

“Sistem Informasi Umum Perencanaan Pengadaan adalah SIRUP yang merupakan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Perpustakaan Negeri Sultra, dan layanan kearsipannya sendiri baru akan beroperasi pada tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan RUP di Perpustakaan Negeri Sultra dengan lebih efisien dan efektif. Pelayanan pengarsipan yang efisien dan transparansi sehingga masyarakat dapat menerima informasi dari layanan tersebut”. (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Setelah mendengarkan penjelasan dari responden, terlihat bahwa perencanaan pengadaan publik yang efisien dan efektif memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu langkah yang terlihat adalah penggunaan proses penerbitan RUP pada SIRUP (Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu). Artinya, pengumuman RUP akan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penerbitan RUP melalui SIRUP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya pemerintah. Selain itu, proses penerbitan RUP melalui aplikasi SIRUP tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi dan peluang usaha, namun juga mendorong persaingan yang sehat dan adil (non-diskriminasi) bagi seluruh pelaku ekonomi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi illegal acces dan kerusakan sistem

Keamanan data dalam Sistem Informasi Perencanaan Koleksi Umum (SIRUP) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi aspek yang sangat krusial dalam upaya mencegah akses yang tidak sah dan kerusakan sistem selama proses perencanaan koleksi umum. Dalam konteks ini, kerjasama antara LKPP dan Badan Sandi Negara didasarkan pada hasil wawancara dengan Muhammad Risky Bahar, yang membahas

tentang langkah-langkah keamanan data dan tingkat enkripsi yang diimplementasikan oleh tim SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan keamanan dari akses yang tidak sah dan kerusakan sistem, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil:

“Untuk keamanan data, LKPP berkolaborasi dengan badan pengawas keamanan data di negara untuk menjaga kerahasiaan data peserta lelang. Dalam hal akses ilegal, LKPP memilih menggunakan E-Control. Fungsinya adalah mengawasi seluruh operasi yang dilakukan oleh SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dan mencegah kerusakan pada sistem SIRUP tersebut. Langkah lain yang diambil adalah memperbaiki dua server untuk secara otomatis membuat cadangan data ketika terjadi kerusakan.” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa keamanan data yang masuk ke dalam sistem SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tanggung jawab penanggung jawab dan pengelola yaitu PA/apapun selain KPA jelas tidak bisa mempertahankannya agen kripto. Untuk mencegah akses ilegal, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (LKPP) sebagai server pusat dilengkapi dengan kontrol elektronik untuk memantau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh SIRUP, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila terjadi perilaku yang tidak wajar, LKPP akan memberikan teguran tegas. Untuk menghindari kerusakan server, pihak pengelola telah menyediakan dua server cadangan jika server utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra mengalami kerusakan.

2. Kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem

Kecepatan dan keakuratan informasi dalam menggunakan sistem ini sangat penting untuk memastikan seluruh transaksi dalam sistem pengadaan barang/jasa tepat waktu dan akurat serta mendukung ketersediaan akses pada sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Risky Bahar mengenai kecepatan dan keakuratan informasi pada saat menggunakan sistem, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

” Seluruh aktivitas yang dilakukan pengguna sistem ini tercatat dalam log SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara, antara lain: Entri dokumen, waktu akhir pemasukan data, daftar paket, dan sistem keputusan perencanaan pengadaan umum. Dan kecepatan verifikasi sistem SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra sangat cepat. Namun, akan lambat apabila banyak pengguna yang login pada saat yang bersamaan, ini biasanya terjadi apabila batas waktu pengumuman RUP tinggal beberapa hari lagi menyebabkan banyaknya pengguna yang menggunakan sistem ini bahkan seluruh Indonesia jadi wajar apabila terjadi

keterlambatan sistem. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut adalah penginputan RUP pada aplikasi SIRUP dilakukan di luar jam kerja dikarenakan akan terjadi penurunan jumlah pengguna sistem di luar jam kerja”. (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa seluruh informasi mengenai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan diumumkan sudah masuk dalam sistem SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengguna sistem dapat langsung melihat file-file yang diperlukan untuk pengumuman RUP dan file-file yang sudah ada di sistem. Seluruh kegiatan mulai dari entri data hingga sertifikasi data dan penerbitan RUP semuanya dilaksanakan dalam sistem SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk pengguna SIRUP dalam hal ini penanggungjawab SIRUP atau PA/KPA dalam peninjauan sistem ini terbilang cepat dan tidak memiliki kendala apapun untuk menggunakan sistem SIRUP. Namun, sistem ini akan mengalami keterlambatan apabila pengumuman RUP harus segera diumumkan. Hal ini dikarenakan pengumuman RUP di Indonesia dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh sebab itu, sistem akan mengalami *down/error* jika digunakan untuk mengumumkan RUP pada jam kerja. Maka solusi dari permasalahan ini adalah, penanggungjawab atau PA/KPA akan mengumumkan RUP pada saat di luar jam kerja untuk menghindari keterlambatan sistem dan *error* sistem. Dikarenakan di luar jam kerja pengguna sistem akan menurun dan sistem akan lebih mendukung untuk digunakan, dan pengumuman RUP pada SIRUP bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Tingkat pencatatan dan perhitungan informasi

Pengguna Sistem Informasi Umum Perencanaan Pengadaan (SIRUP) diharapkan mampu mencatat dan melakukan perhitungan informasi secara akurat sehingga memungkinkan terbitnya RUP. Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Bustamar Supu mengenai ruang lingkup pengumpulan dan perhitungan informasi.

“Untuk pencatatan dan perhitungan informasi yang ada pada SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Humas dan dimasukkan kedalam SIRUP. Data informasi yang di input pada SIRUP memiliki 2 format yaitu swakelola dan penyedia, dan admin SIRUP atau PA/KPA akan mengisi sesuai format data yang diberikan, apakah data/informasi yang akan dimasukkan akan diinput pada bagian penyedia atau swakelola. Dan data/informasi diisi rinciannya sesuai dengan nomor rekening dan sifat pengadaannya apakah swakelola atau penyedia.” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa pengumpulan dan penghitungan informasi bukan merupakan tanggung jawab SIRUP, karena fungsinya di sini adalah sebuah sistem. Divisi Perencanaan dan Humas bertugas melakukan pencatatan dan tabulasi. Selain pencatatan dan perhitungan, fungsi Bagian Perencanaan dan Humas merupakan tugas yang diberikan oleh PA/KPA yaitu Direktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merencanakan dan mempublikasikan RUP informasi perencanaan pengadaan umum. Itu dia

sistem (sirup) Data yang dimasukkan ke dalam SIRUP oleh PA/KPA sendiri ada dua bentuk yaitu data yang dikelola sendiri dan penyedia.

Menu swakelola pada SIRUP, atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan biasanya mencakup opsi dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola sendiri proses pengadaan barang dan jasa tanpa keterlibatan pihak ketiga atau kontraktor. Menu swakelola pada sistem SIRUP memiliki berbagai fungsi yang dirancang untuk memberdayakan pihak pengguna atau pemangku kepentingan tertentu dalam pengelolaan mandiri proses pengadaan barang dan jasa. Menu swakelola ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak yang akan melakukan pengadaan dalam hal ini PA/KPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan keterlibatan langsung dalam seluruh siklus pengadaan.

Menu penyedia pada SIRUP, atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, biasanya mencakup opsi dan fitur yang memungkinkan penyedia barang atau jasa berinteraksi dengan platform tersebut. Menu penyedia ini dirancang untuk memberikan akses dan kemampuan kepada penyedia dalam seluruh siklus pengadaan. Menu penyedia bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan penyedia dalam proses pengadaan, mempermudah proses penawaran, dan memberikan transparansi dalam setiap langkah perencanaan pengadaan.

4. Kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem

Pembaruan secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa konten informasi yang dihasilkan oleh sistem tetap lengkap, sehingga semua aspek yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat atau peserta lelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Risky Bahar mengenai kelengkapan konten informasi yang dihasilkan oleh sistem, berikut adalah temuannya:

“Dalam SIRUP, semua informasi terkait dengan pengumuman pengadaan, berita terkini, login untuk penyedia dan non-penyedia, informasi tentang SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, kontak yang dapat dihubungi, dan regulasi semuanya tersedia dan dapat diakses oleh peserta lelang dan

masyarakat umum. Selain itu, laporan atau output data yang telah dimasukkan ke dalam sistem SIRUP dapat dilihat kembali dalam bentuk PDF. Dengan file tersebut, PA/KPA dapat meninjau data atau informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem.” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Berdasarkan pemahaman hasil wawancara yang disampaikan, terlihat bahwa Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) memiliki berbagai informasi dan fitur. SIRUP menyediakan informasi terkait pengadaan dan berita terkait. Ini memungkinkan peserta lelang, baik penyedia maupun non-penyedia untuk mengakses informasi terkini terkait proses pengadaan. SIRUP memberikan layanan log-in yang terpisah untuk penyedia dan non-penyedia. Hal ini menciptakan akses terkendali dan sesuai peran, memastikan bahwa informasi yang diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Detail kontak yang dapat dihubungi terkait dengan SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah disertakan. Ini mencakup informasi yang memudahkan peserta lelang atau pihak terkait untuk berkomunikasi atau mendapatkan bantuan jika diperlukan. Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa telah tersedia dalam sistem. Ini memastikan bahwa peserta lelang memiliki akses ke pedoman dan aturan yang berlaku selama proses pengadaan. SIRUP mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan membuat informasi termasuk pengumuman, berita, dan regulasi, terbuka bagi peserta lelang dan masyarakat. SIRUP memfasilitasi pembuatan laporan atau output data yang telah diinput. Laporan ini tersedia dalam format PDF, memudahkan PA/KPA untuk meninjau kembali dan memeriksa informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Dengan menyajikan informasi secara terbuka, memberikan berita dan pengumuman, serta memberikan kemudahan akses untuk melihat dan mengkaji laporan, SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra bersifat transparan, terkini dan mudah diakses. Hal ini menunjukkan komitmen kami dalam membangun sistem yang menyediakan akses ke Kepada semua orang yang terlibat.

5. Relevansi yang menunjuk kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan

Penerapan sistem ini pada kegiatan pengadaan barang/jasa akan menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan PA/KPA Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan sesuai dengan informasi yang diterima masyarakat dan manfaat penerapan sistem tersebut. Membuat laporan terkait pada Sistem Informasi Umum Perencanaan Pengadaan. Dari segi relevansi yang menunjukkan kecukupan informasi dan kegunaan laporan yang dihasilkan, hasil wawancara dengan Bapak Bustamar Supu adalah sebagai berikut:

“Pengenputan SIRUP terdiri dari beberapa proses. Yang pertama pengenputan. Yaitu mengisi data-data paket, jumlah uang, dan sifat pengadaan. Setelah pengenputan datanya disimpan, selanjutnya pada tahap ke-dua yaitu mengumumkan RUP. Setelah RUP diumumkan menggunakan akun PA/KPA baru setelah itu bisa ditinjau oleh publik. Jadi untuk relevansinya sudah dipastikan sebelum pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini”. (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman terhadap relevansi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu, proses pengenputan dalam SIRUP dimulai dengan mengisi data-data paket, jumlah uang, dan sifat pengadaan. Langkah ini menekankan pentingnya memasukkan informasi yang relevan dan akurat terkait dengan pengadaan barang/jasa. Setelah data diinput, informasi disimpan dalam SIRUP. Penyimpanan data ini menciptakan basis data yang dapat di andalkan dan dapat diakses kembali pada tahap selanjutnya dalam proses pengadaan. Tahap selanjutnya adalah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) . Pengumuman ini menggunakan akun PA/KPA. RUP mencakup rincian lengkap terkait rencana pengadaan, memberikan gambaran menyeluruh kepada pihak yang berkepentingan. Setelah pengumuman RUP, informasi tersebut dapat diakses dan ditinjau oleh publik. Proses ini menciptakan transparansi, memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses dan memahami rencana pengadaan yang telah diumumkan. Poin penting yang ditekankan adalah pastikan bahwa data yang dimasukkan dalam SIRUP sudah relevan sebelum mengumumkan RUP. Hal ini menekankan pada kualitas dari ketepatan data sebagai dasar yang diperlukan untuk keputusan dan evaluasi yang baik.

Melalui uraian ini, terlihat bahwa relevansi SIRUP dipertahankan melalui proses yang terstruktur dan terencana, dimulai dari pengenputan data yang akurat hingga pengumuman RUP dan tinjauan publik. Aspek-aspek ini menunjukkan bagaimana SIRUP tidak hanya menjadi alat administrative, tetapi juga instrument pendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengadaan barang atau jasa.

6. Ketercapaian sistem pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tujuan dibentuknya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Pengenalan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu (SIRUP) bertujuan untuk mencapai tujuan pembentukan badan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Risky Bahar yang menerima SIRUP

sehubungan dengan tujuan didirikannya Lembaga Penelitian Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

“Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara saat ini sedang menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) sesuai dengan tujuan LKPP sebagai lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SIRUP di seluruh Indonesia.” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Berdasarkan hasil dialog, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil melaksanakan SIRUP. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan SIRUP dilaksanakan sesuai dengan tujuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Menurut LKPP, tujuan SIRUP adalah untuk memfasilitasi penerbitan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PA/KPA. LKPP memainkan peran penting dalam mengatur dan memastikan penerapan SIRUP di seluruh Indonesia. Dengan penerapan SIRUP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra menunjukkan sikap tanggap terhadap kebijakan nasional terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan kesediaan lembaga tersebut untuk mematuhi standar dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Keberhasilan sistem ini menegaskan bahwa SIRUP digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengelola proses pengadaan. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sepanjang siklus pengadaan barang dan jasa.

Melalui pemahaman ini, tergambar bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil menerapkan SIRUP sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Implementasi ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pastinya, ada elemen yang mendukung dan juga menghalangi keberhasilan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) dalam layanan perpustakaan dan arsip di Sulawesi Tenggara.

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya Manusia

Penerapan sistem, khususnya Sistem Informasi Umum Perencanaan Pengadaan (SIRUP), juga harus didukung oleh kepegawaian yang seimbang. Keterangan Bapak Muhammad Risky Bahar penanggung jawab SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra:

“Efektivitas pelaksanaan, pengelolaan dan transaksi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara terutama ditentukan oleh sumber daya manusia. Lembaga ini memungkinkan pegawainya melakukan transaksi dan menyajikan data. Namun untuk pengoperasian SIRUP sendiri masih kurang dipahami. Oleh sebab itu, yang menjalankan SIRUP hanya terdiri atas beberapa orang saja di kantor ini, namun itu sudah cukup untuk melaksanakan dan mengelola sistem ini” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan manajemen transaksi di Badan Perpustakaan dan Bahan Sultra. Keterampilan, pemahaman dan disiplin staf dan karyawan Anda memiliki dampak besar pada kelancaran bisnis Anda. Pegawai atau pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara mempunyai kemampuan dalam melakukan transaksi dan menyajikan data. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sumber daya manusia terhadap cara pengelolaan data. Meskipun staf atau pegawai memiliki keterampilan dalam melaksanakan transaksi dan penyajian data, pemahaman terhadap pengoperasian SIRUP masih kurang. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengadopsi dan memahami teknologi informasi yang lebih canggih seperti SIRUP. Pengoperasian SIRUP masih kurang dipahami secara umum, yang menjalankan SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa orang saja. Meskipun jumlah ini terbatas, namun cukup untuk melaksanakan dan mengelola sistem SIRUP ini menunjukkan keefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia.

Melalui pemahaman ini, tergambar bahwa sumber daya manusia memainkan peran vital dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adanya keterbatasan pemahaman terhadap SIRUP menunjukkan potensi untuk peningkatan pelatihan atau pengembangan keterampilan di tingkat organisasi. Meskipun demikian, keberhasilan di dalam mengoperasikan SIRUP dengan jumlah yang terbatas menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.

2) Sarana dan Prasarana

Implementasi pengadaan barang/jasa khususnya Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu Sarana dan Prasarana (SIRUP) telah mencapai implementasi yang efektif, seperti disampaikan oleh Bapak Muhammad Risky Bahar, Kepala SIRUP Perpustakaan - dan Dinas Kearsipan Sulawesi Tenggara :

“Prasarana kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara menjadi sarana pendukung untuk memperlancar aktivitas di kantor” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sarana dan prasana di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai alat pendukung dan memiliki fungsi utama memperlancar aktivitas yang berlangsung didalam kantor. Ini mencakup berbagai failitas dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Pemahaman ini menekankan pentingnya kelancaran aktivitas di dalam kantor. Sarana dan prasana sebagai faktor penunjang yang mendukung produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sarana dan prasarana ini melibatkan fasilitas seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan komputer, akses internet, sistem komunikasi, tempat penyimpanan arsip, serta peralatan kantor lainnya. Semua ini berkontribusi untuk memfasilitasi pekerjaan sehari-hari.

Dengan adanya sarana prasarana yang memadai, diharapkan karyawan dapat mengoptimalkan kinerja dan kreativitas mereka. Lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja.

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan serta visi dan tujuan Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) yang telah ditetapkan.

Melalui pemahaman ini, terlihat bahwa sarana dan prasarana di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai aspek penting dalam kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan kelancaran serta efektivitas kegiatan sehari-hari. Dalam konteks ini, perhatian terhadap pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang optimal.

3) Tersedianya DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran)

Penerapan dan pengoperasian SIRUP penting untuk mencapai efektivitas implementasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bustamar Supu, Petugas SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara:

“Tersedianya DPA merupakan hal penting dalam faktor pendukung pengoperasian SIRUP. Ini dikarenakan, penginputan RUP pada SIRUP akan terlaksana apabila DPA telah diterbitkan” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa, ketersediaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) merupakan faktor penting dalam mendukung operasional Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Hal ini disebabkan oleh keterkaitan antara DPA dan proses penginputan Rencana Umum Pengadaan pada SIRUP.

Pentingnya DPA dalam faktor pendukung dalam pengoperasian SIRUP adalah :

- 1) Keakuratan dan konsistensi Data, DPA memberikan kerangka kerja yang jelas untuk alokasi anggaran, sehingga penginputan RUP dapat dilakukan dengan lebih akurat dan konsisten.
- 2) Kepatuhan terhadap Prosedur dan Peraturan, DPA merupakan dokumen yang menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam penggunaan anggaran, yang harus ditaati dalam proses penginputan RUP.
- 3) Keterkaitan dengan Alur Kerja : DPA menjadi langkah yang diperlukan dalam alur pengoperasian SIRUP, dimana keberadaannya menjadi kunci untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara berbagai dokumen dan proses dalam konteks SIRUP. Dengan memahami hubungan antara DPA dan peninputan RUP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam SIRUP sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung integritas dan akurasi informasi yang dihasilkan oleh SIRUP.

b. Faktor Penghambat

1) Kecepatan Akses Internet

Kecepatan akses internet, jaringan komunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang tersedia bagi masyarakat untuk mengakses portal layanan menjadi kendala dalam operasional SIRUP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Salam dari Bapak Bustamar Spuh, Direktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, SIRUP :

“Hambatan Penerapan SIRUP pada kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu ada waktu dimana kecepatan jaringan internet menjadi lambat, hal ini menyebabkan penginputan RUP menjadi terhambat” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu hambatan dalam penerapan SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah adanya kendala pada kecepatan jaringan internet. Kendala ini khususnya ketika kecepatan jaringan menjadi lambat pada waktu tertentu, memiliki dampak langsung terhadap proses penginputan RUP.

Maslah terjadi pada suatu periode waktu tertentu, dan dalam konteks ini, disebabkan oleh penurunan kecepatan jaringan internet. Ini menunjukkan bahwa hambatan ini bersifat situasional dan terkait dengan kondisi jaringan yang bervariasi.

Kendala pada kecepatan jaringan internet langsung mempengaruhi proses penginputan RUP pada sistem SIRUP. Keterbatasan kecepatan dapat menyebabkan penundaan atau keterlambatan dalam mengakses dan memasukkan informasi RUP ke dalam sistem SIRUP.

Kecepatan internet yang rendah diidentifikasi sebagai hambatan yang menghambat operasional SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hambatan ini dapat menciptakan tantangan dalam menjalankan proses sistem secara efisien. Kondisi jaringan yang lambat dapat mempengaruhi kinerja sistem SIRUP secara keseluruhan.

Identifikasi hambatan ini memberikan petunjuk bahwa diperlukan solusi teknis atau optimalisasi untuk mengatasi masalah kecepatan jaringan internet agar SIRUP dapat beroperasi dengan optimal, khususnya pada waktu-waktu dimana kendala ini terjadi. Solusi ini bisa jadi dengan peningkatan infrastruktur jaringan atau implementasi teknologi yang dapat meningkatkan ketersediaan dan kecepatan internet.

2) Sistem Mengalami Down/Macet

Sistem dapat mengalami down/macet ketika penginputan SIRUP sedang dilakukan pada pengumuman RUP pada sistem pada waktu yang bersamaan dengan seluruh pengguna sistem. Ini menjadi faktor penghambat dalam pengoperasian SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti yang disampaikan oleh bapak Bustamar Supu selaku Penanggungjawab SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara :

“Faktor penghambatan pengelolaan dan pengoperasian SIRUP juga bisa jadi dikarenakan sistem sedang mengalami down atau macet. Hal ini biasa terjadi apabila banyak pengguna atau server yang menggunakan SIRUP. Penginputan SIRUP itu dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia, ini menyebabkan sistem menjadi down dan penginputan SIRUP menjadi terhambat. Oleh karena itu, solusi yang kami gunakan adalah, menginput RUP pada SIRUP di luar jam kerja. Karena pengguna sistem menjadi lebih sedikit dan sistem menjadi lebih lancar ketika di gunakan” (Wawancara dengan penanggungjawab SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara 07 Desember 2023)

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dan pengoperasian SIRUP dapat terjadi karena sistem mengalami down atau macet. Ini umumnya terjadi ketika ada banyak pengguna atau server yang menggunakan SIRUP, Kkhususnya selama proses penginputan SIRUP, khususnya selama proses penginputan SIRUP yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Kendala kinerja, seperti down atau sistem yang macet, dapat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dan pengoperasian SIRUP. Situasi ini dapat muncul ketika kapasitas sistem tidak mampu menangani jumlah pengguna atau beban kerja yang tinggi.

Proses penginputan SIRUP yang dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia mencerminkan skala nasional penggunaan sistem ini. Hal ini dapat menciptakan lonjakan penggunaan yang signifikan, terutama pada saat-saat tertentu, yang mengakibatkan pembebanan sistem. Down atau kemacetan sistem menyebabkan penghambatan dalam proses penginputan RUP. ini dapat menyulitkan penyedia dalam melakukan penginputan data yang diperlukan ke dalam sistem SIRUP. Solusi yang diambil adalah menginput RUP pada SIRUP di luar jam kerja. Dengan mengurangi penggunaan sistem selama jam kerja normal, diharapkan dapat mengatasi beban kerja tinggi dan mencegah terjadinya down atau kendala kinerja. Pengaturan penginputan di luar jam kerja mencerminkan pendekatan manajemen beban kerja sistem yang bijaksana. Ini menunjukkan kesadaran akan potensi masalah selama periode tingginya penggunaan dan usaha untuk mengoptimalkan kinerja sistem SIRUP.

Pemilihan waktu penginputan di luar jam kerja bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penggunaan SIRUP. Dengan mengurangi jumlah pengguna pada saat bersamaan, diharapkan sistem dapat beroperasi lebih lancar dan efisien. Pemahaman ini menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan adalah respons yang proaktif dan dapat membantu mengatasi kendala yang muncul selama penggunaan SIRUP pada waktu-waktu tertentu. Pengaturan waktu penginputan di luar jam kerja mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan

penggunaan SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara agar tetap efisien dan lancar.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara

Efektivitas merujuk pada upaya mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan dalam konteks ini, keberhasilan sistem informasi dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator tersebut meliputi aspek-aspek yang penting dalam mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Bodnar (2000:700) menggambarkan indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

a. Keamanan Data, Tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi aktivitas tidak wajar dan kerusakan pada sistem

Tujuan utama efektifnya penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang (SIRUP) Terpadu adalah membantu PA/KPA seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan untuk lebih mudah menerbitkan RUP. Ketika menerapkan sistem ini, penting untuk mempertimbangkan indikator efektivitasnya (Bodnar, 2000: 700). Salah satu faktor terpenting dalam hal ini adalah tingkat keamanan data, yaitu kemampuan sistem dalam mengatasi aktivitas abnormal dan kerusakan pada sistem. Direktorat Jenderal Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan (LKPP) yang bertanggung jawab atas Sistem Informasi Terpadu Perencanaan Pengadaan (SIRUP) telah bekerja sama dengan Badan Sandi Negara untuk meningkatkan keamanan data di LPSE seluruh Indonesia, khususnya di SIRUP Sulawesi Selatan. Perpustakaan Negara dan layanan arsip.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga memiliki E-Control yang misinya adalah memantau kegiatan-kegiatan yang tidak teratur yang dilakukan oleh SIRUP di Sultra, dan memantau kegiatan-kegiatan tidak teratur yang dilakukan oleh SIRUP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra. untuk memantau seluruh aktivitas. Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Cegah Kerusakan Server Layanan Perpustakaan dan Kearsipan SIRUP Sultra otomatis berfungsi apabila server utama mengalami kerusakan dan server kedua (server cadangan) berfungsi otomatis apabila kedua server mengalami kerusakan.

b. Kecepatan dan Ketepatan Informasi dalam Pemakaian Sistem

Menurut Bodnar (2000: 700), efektivitas penerapan sistem informasi umum untuk perencanaan pengadaan juga memerlukan pertimbangan indikator kecepatan dan keakuratan informasi pada saat menggunakan sistem tersebut. Karena kecepatan sistem layanan SIRUP, SIRUP memberikan akses mudah dan langsung ke semua informasi terkait RUP. Pengguna sistem dapat meninjau dan memeriksa semua berkas yang diperlukan untuk pengumuman RUP dengan cepat. SIRUP mencakup seluruh rangkaian proses pengumuman RUP, termasuk pemasukan data, kualifikasi data, dan pengumuman RUP. Ini memastikan keberlanjutan dan integritas informasi sepanjang proses. Pengguna sistem, terutama penanggung jawab (PA/KPA), mengalami kecepatan dan kemudahan dalam menggunakan SIRUP. Ini mencerminkan efisiensi dalam administrasi dan manajemen RUP.

Kendala muncul ketika pengumuman RUP harus dilakukan pada jam kerja yang mana hal ini bersamaan dilakukan di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja atau eror sistem karena tingginya beban penggunaan pada waktu tersebut. Solusi atau tindakan yang dilakukan adalah mengumumkan RUP di luar jam kerja untuk menghindari keterlambatan dan eror sistem. Penanggungjawab (PA/KPA) akan melakukan pengumuman pada saat di luar jam kerja, dimana pengguna sistem cenderung lebih sedikit, sehingga sistem dapat menanggung beban penggunaan dengan lebih baik.

Pilihan untuk mengumumkan RUP di luar jam kerja merupakan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan SIRUP. Ini memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik dan memberikan dukungan maksimal pada saat pengumuman dilakukan. Mengumumkan RUP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menjadi prioritas utama, dan solusi yang diusulkan di luar jam kerja mencerminkan responsibilitas dan fleksibilitas dalam menjaga kelancaran proses. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala terkait keterbatasan jam kerja, solusi yang diusulkan mencerminkan adaptasi dan pengoptimalan penggunaan sistem untuk memastikan pengumuman RUP dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Tingkat Pencatatan dan Perhitungan Informasi

Menurut Bodnar (2000: 700), efektivitas penerapan sistem informasi perencanaan pengadaan secara umum juga harus mempertimbangkan indikator sejauh mana pengumpulan dan penghitungan informasi. Karena metrik ini sangat penting. Fungsi utama SIRUP dalam konteks ini adalah sebagai sistem perencanaan pengadaan. Pencatatan dan perhitungan sebagaimana dijelaskan merupakan tanggung jawab dari sub bagian perencanaan dan humas,

bukan SIRUP. Ini menunjukkan peran jelas dan pembagian tugas antara sistem dan organisasi.

PA/KPA, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengumumkan RUP melalui SIRUP. SIRUP berfungsi sebagai alat untuk mendukung proses ini. Data yang dimasukkan oleh PA/KPA memiliki dua format, yaitu swakelola dan penyedia. Swakelola memberikan kontrol kepada PA/KPA untuk mengelola sendiri proses pengadaan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Format penyedia memungkinkan penyedia barang atau jasa berinteraksi dengan platform, meningkatkan keterlibatan penyedia dalam seluruh siklus pengadaan.

d. Kelengkapan Isi Informasi yang Dihasilkan Sistem

Menurut Bodnar (2000:700), efektivitas penerapan Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) harus dievaluasi berdasarkan indikator kelengkapan konten yang dihasilkan sistem. Dalam hal ini SIRUP menyajikan berbagai informasi dan berita terkait proses pengadaan. Fitur ini memastikan peserta lelang memiliki akses ke informasi terkini yang relevan dengan proses pengadaan yang sedang berlangsung.

Adanya layanan log-in terpisah untuk penyedia dan non-penyedia menciptakan akses terkendali dan sesuai peran. Ini menjamin bahwa informasi ini memudahkan peserta lelang atau pihak terkait untuk berkomunikasi atau mendapatkan bantuan jika diperlukan. SIRUP juga menyertakan detail kontak terkait dengan dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Sulawesi tenggara.

Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa tersedia dalam pedoman dan aturan yang berlaku selama proses pengadaan, meningkatkan kejelasan dan pemahaman aturan. SIRUP mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Informasi termasuk pengumuman, berita, dan regulasi, dibuat terbuka bagi peserta lelang dan masyarakat umum. Ini menciptakan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. SIRUP memfasilitasi pembuatan laporan atau output data yang telah diinput, dan laporan ini tersedia dalam format pdf, hal ini memudahkan PA/KPA untuk meninjau kembali dan memeriksa informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem.

Dengan menyajikan informasi secara terbuka, menyediakan berita dan pengumuman, serta memberikan kemudahan akses untuk melihat dan mereview laporan, SIRUP menunjukkan komitmen dalam menciptakan sistem yang transparan, terkini, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Analisis ini menyoroti bawa SIRUP tidak hanya

berfungsi sebagai alat administrasi pengadaan, tetapi juga sebagai platform yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan aktif dari peserta lelang dan masyarakat umum dalam proses pengadaan.

e. Relevansi yang menunjuk kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan

Menurut Bodnar (2000:700), efektivitas penerapan Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) harus dievaluasi berdasarkan indikator relevansi, kesesuaian, dan kegunaan laporan yang dihasilkan oleh sistem. Dalam hal ini SIRUP memulai prosesnya dengan penginputan data yang melibatkan informasi paket, jumlah uang, dan sifat pengadaan. Langkah ini menekankan pentingnya memasukkan data yang benar dan akurat.

Informasi yang diinput disimpan dalam SIRUP, menciptakan basis data yang andal dan dapat diakses kembali. Ini mendukung integritas data dan memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan pada tahap-tahap berikutnya dalam proses pengadaan. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan menggunakan akun PA/KPA. RUP mencakup rincian lengkap terkait rencana pengadaan, memberikan gambaran menyeluruh kepada pihak berkepentingan, menunjukkan bagaimana SIRUP menjadi alat penting dalam proses komunikasi dan pengumuman kebijakan.

Setelah pengumuman RUP, informasi tersebut dapat diakses dan ditinjau oleh publik. Langkah ini menciptakan transparansi dalam proses pengadaan yang telah diumumkan. Kebutuhan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam SIRUP sudah relevan dan akurat sebelum mengumumkan RUP. Ini menekankan pada kualitas data sebagai dasar yang diperlukan untuk keputusan dan evaluasi yang baik. Melalui proses yang terstruktur dan terencana, SIRUP tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga menjadi instrument pendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian analisis ini menunjukkan relevansi SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkuat melalui pengelolaan data yang terstruktur, pengumuman RUP yang terkendali, dan perhatian khusus terhadap kualitas data untuk mendukung integritas dan keberlanjutan proses pengadaan. SIRUP bukan hanya alat administratif tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih baik.

f. Ketercapaian Sistem Sesuai Dengan Tujuan Dibentuknya SIRUP

Penerapan SIRUP pada layanan perpustakaan dan kearsipan di Sultra sesuai dengan tujuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). LKPP berperan sentral

dalam menyelenggarakan dan memastikan pelaksanaan SIRUP di seluruh Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan responsnya terhadap kebijakan nasional mengenai perencanaan umum pengadaan. Hal ini menunjukkan kesediaan dan keterbukaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan untuk mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional.

Ketercapaian sistem SIRUP menegaskan bahwa SIRUP digunakan sebagai alat efektif dalam pengelolaan proses rencana umum pengadaan. Dengan demikian, SIRUP membantu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola secara keseluruhan dalam siklus pengadaan barang dan jasa. Implementasi SIRUP menjadi langkah positif dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standard an kualitas dalam manajemen pengadaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan efektivitas penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) di Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) pada perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tenggara mengalami kemajuan yang sangat baik. Sejak penerapan sistem ini mulai tahun 2018, segala bentuk terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) kini diselesaikan secara efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui PA/KPA.
2. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Terpadu (SIRUP) pada perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tenggara memiliki unsur-unsur yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia dalam sistem tersebut. Manajemen dengan dukungan sumber daya manusia akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara. Faktor pendukung lainnya, seperti infrastruktur, juga sangat menentukan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) pada layanan perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tenggara serta operasionalnya yang efektif dan efisien. Selain faktor pendukung dalam pelaksanaannya, SIRUP juga mempunyai faktor penghambat seperti kecepatan akses internet dan permasalahan kegagalan sistem/tersumbat pada saat memasuki RUP. Hal ini menjadi kendala dalam

penerapan SIRUP dan menjadi penyebab tidak berhasilnya penerapan SIRUP pada layanan perpustakaan dan kearsipan di Sulawesi Tenggara.

3. Indikator efektivitas Rencana Umum Pengadaan Informasi (SIRUP) menunjukkan bahwa perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kumong telah meningkatkan Sekretariat setelah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi, seperti keamanan data dan kapasitas sistem dalam pengolahan informasi bahwa Anda mencapai kesuksesan sesuai dengan standar Anda Tindakan ilegal. Faktor-faktor yang dinilai meliputi akses dan kelengkapan sistem, kecepatan dan keakuratan informasi saat menggunakan sistem, tingkat dokumentasi dan analisis informasi, kelengkapan konten informasi yang dihasilkan, dan tujuan penetapan kebijakan pengadaan Evaluasi produk dan layanan pada Pusat Penelitian (LKPP).

REFERENSI

- Anggraeni, E. Y. dan R. I. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Andi.
- Mandagi, M. (2019). *E-Government Dalam Konteks Pelayanan Publik*. Penerbit Lakeisha.
- Asrijal, A. (2022). *Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran (Efektivitas Pelaksanaan Dan Kendala Yang Dihadapi)*. CV. Mitra Media.
- Arindya, R. (2019). *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Media Sahabat Cendekia.
- Arsana, I. P. j. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. AE Publishing.
- Angrayni, Lysa, dkk. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bodnar. George William Hopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Haning, Mohamad Thahir, Hasniati, M. H. T. (2020). *Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi dan Strategi*. UPT Unhas Press.
- Moemahdi, M. S. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Teori, Praktek, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Justicia, V. (2017). *Peraturan Pengadaan Barang & Jasa*. Genesis Learning.
- Hamkah. (2023). *Pengantar Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. CV. Tohar Media.

- Patria, N. (2020). *Memahami PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019)*. Deepublish.
- Purwoko, B. P. (2021). *Bentuk-Bentuk Perusahaan*. CV. Amal Saleh.
- Tjandra, R. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Kencana.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKis Yogyakarta.
- Oktavianti, G. (2019). *Pengantar Sistem Informasi*. 1.
- Rachman, S., & Yuliani, N. F. (2022). *Analisis Efektivitas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Yayasan Hadji Kalla Makassar*. 9(1), 18–22.
- Ariesta, D. (2021). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Administrasi Jakarta Selatan (Effectiveness of procurement of goods and services through e-catalogue in kebayoran lama district, Jakarta Selatan Administration City)*.
- Cahyani, R. S. (2017). *Analisis Penerapan E-Procurement dalam Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Inalum (Persero)*.
- Habibi, Muhammad Mutjaba, S. U. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kota Malang*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.
- Nurchana, A. R. A. (2014). *Efektivitas e-procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan e-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*.
- Padang, V. S. (2016). *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)*.
- Piandayani, P. (2022). *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan*.
- Sinngih, N. (2022). *Tinjauan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Si-RUP)*. *Journal of Jurisdiscche Analyse*, 1.
- Suprianto, Barawijaya., D. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan/Jasa Pemerintah (Studi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya)*.

- Swadesi, U. (2017). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4.
- PUTRI, H. I., Nurmah, N., & Marpaung, Z. S. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ...* <https://repository.unsri.ac.id/8231/>
- Hasyim, S., Usnida Umar, & Hartati Malkab. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), 97–107. <https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.160>
- Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Ilmu Politik dan Komunikasi VI*(1), 1–18.
- Pengadaan, E., Dan, B., & Melalui, J. (2021). *KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District , Jakarta Selatan Administration City) Deby Ariesta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Email : deby.ariesta@gmail.com. 1*(2).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengadaan barang dan jasa